

2019

**SMA
EKONOMI**



085223273373

FISKAL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.
- Fungsi APBN:
 - ✓ Fungsi Alokasi
APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan *public goods* atau kebutuhan umum akan terpenuhi.
 - ✓ Fungsi Distribusi
APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor.
 - ✓ Fungsi Stabilisasi
APBN berfungsi untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.
- Contoh APBN 2017/2018

Uraian (harian Rupiah)	2017 Outlook	2018 APBN	% thd Outlook 2017	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.894,7	109,1	158,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.220,7	105,8	121,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(87,3)	60,5	57,0
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362,9)	(325,9)	89,8	36,9
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,67)	(2,19)		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362,9	325,9	89,8	(36,9)
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2	93,5	(27,8)
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)	109,9	(5,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)	182,4	(3,0)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)	111,5	(0,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2	61,0	(0,1)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baik Propinsi ataupun Kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD.

KEBIJAKAN FISKAL

- Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara atau APBN, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Instrumen dari kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.
- Kebijakan Fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 - ✓ Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga dapat menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, seperti dengan menambah subsidi, dan dengan menurunkan tingkat pajak.

✓ Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dengan peningkatan pajak / mengefektifkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga inflasi dapat teratasi.

Instrumen kebijakan fiskal kontraktif salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah, seperti subsidi.

• Macam-macam Kebijakan Anggaran :

✓ Anggaran Seimbang

Anggaran yang disusun dengan pendapatan totalnya sama/seimbang dengan pengeluaran totalnya

✓ Anggaran Defisit

Anggaran dengan pengeluaran rutin negara lebih besar dari pada penerimaan dalam negerinya. Defisit dapat dibiayai, salah satunya dengan utang.

✓ Anggaran Surplus

Anggaran dengan penerimaan dalam negeri lebih besar dari pada pengeluaran rutin.

• Prinsip-prinsip atau asas dalam menyusun APBN:

✓ Anggaran berimbang yang dinamis, maksudnya penerimaan diusahakan meningkat melalui tabungan pemerintah.

✓ Penentuan skala prioritas yang tepat, artinya pengeluaran harus disesuaikan dengan kepentingannya.

✓ Dana-dana pembangunan dalam negeri yang makin besar, artinya penerimaan dalam negeri untuk selalu ditingkatkan, sedang penerimaan pembangunan (yang berasal dari utang luar negeri) selalu dihemat atau diperkecil.

✓ Bekerja atas dasar program terpadu, artinya pelaksanaan program yang dapat menjamin terpeliharanya stabilitas kehidupan ekonomi yang mampu mendorong pembangunan secara mantap.

PAJAK

- Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.
- Peranan pajak diantaranya :
- Beberapa sumber pendapatan selain pajak, diantaranya:
 - ✓ Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Manfaat retribusi dirasakan secara langsung oleh orang yang membayar.
 - ✓ Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok atau tembakau.
 - ✓ Bea Masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.
 - ✓ Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang karena sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara.
- Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya

Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
a. Iuran dengan imbalan yang tidak langsung b. Dapat dipaksakan c. Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali d. Prestasi (imbalan) diterima oleh seluruh rakyat	a. Iuran dengan imbalan yang langsung b. Tidak ada unsur paksaan c. Pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu d. Prestasi (imbalan) diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu

- Fungsi Utama Pajak
 - ✓ Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara.

✓ Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

✓ Fungsi Pemerataan

Pajak digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dengan kesejahteraan masyarakat. Atau dengan kata lain pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

• Jenis-Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia

✓ Ditinjau dari cara pemungutannya, dibagi dua :

- Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak perseroan (PPs), Pajak Kekayaan, Pajak deviden, Pajak bunga deposito, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN) dan sebagainya.

- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pita Rokok, Pajak Tontonan, Bea Meterai, Bea Masuk (Pajak Impor), Pajak Ekspor dan sebagainya.

✓ Ditinjau dari obyek yang dikenakan pajak, dibagi dua :

- Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Kekayaan dan sebagainya.

- Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas objeknya. Contoh : Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.

✓ Ditinjau dari siapa yang memungut pajak, dibagi dua :

- Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, Dirjen Bea dan Cukai.
- Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.
- Pemungutan pajak atau sistem penetapan tarif pajak terdiri dari lima cara, yaitu :
 - ✓ Tarif Pajak Proporsional (sebanding) adalah tarif pajak dengan menggunakan prosentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - ✓ Tarif Pajak Degresif (menurun) adalah tarif pajak dengan menggunakan prosentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - ✓ Tarif Pajak Konstan (tetap) adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap.
 - ✓ Tarif Pajak Progresif (menaik) adalah tarif pajak dengan prosentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - ✓ Tarif Pajak Regresif (menurun) adalah tarif pajak dengan menggunakan prosentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak, tetapi penurunannya sedikit-sedikit.

SOAL

1. Sejumlah anggaran dalam APBN akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti perbaikan jalan, membangun terminal, stasiun kereta api dan lainnya. Pengeluaran di atas menunjukkan adanya keterkaitan fungsi APBN yaitu fungsi ...
 - a. distribusi
 - b. stabilisasi
 - c. aplikasi
 - d. efisiensi
 - e. alokasi

2. APBN dikatakan defisit apabila ...
 - a. belanja rutin > penerimaan dalam negeri
 - b. belanja total > penerimaan total
 - c. subsidi kepada daerah > setoran pemerintah daerah
 - d. belanja barang > belanja pegawai
 - e. pembayaran angsuran dan bunga utang > penerimaan pajak

3. Ayat di bawah ini yang BUKAN merupakan pengeluaran atau belanja Pemerintah Daerah (Kota/ Kabupaten) adalah ...
 - a. belanja pegawai pemerintah daerah
 - b. belanja barang-barang kebutuhan instansi pemerintah daerah
 - c. pembayaran angsuran pokok dan bunga utang luar negeri
 - d. biaya pembangunan sarana dan prasarana daerah setempat
 - e. subsidi-subsidi bagi berbagai lapisan masyarakat tertentu

4. Kebijakan fiskal ialah kebijakan makro-ekonomi yang ditempuh melalui dan dilakukan dengan menggunakan instrument ...
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara
 - b. Sertifikat Bank Indonesia
 - c. Peraturan perundang-undangan
 - d. Surat Utang Negara

- e. Tingkat bunga, kurs mata uang, dan lalu lintas devisa
5. Di antara pajak-pajak di bawah ini yang tergolong sebagai pajak tak langsung adalah ...
- a. pajak penghasilan
 - b. pajak penjualan
 - c. pajak kendaraan bermotor
 - d. pajak bumi dan bangunan
 - e. bea balik nama kendaraan bermotor
6. Penerimaan pajak yang terbesar dalam struktur penerimaan pajak pemerintah Pusat Indonesia adalah dari:
- a. cukai
 - b. bea masuk
 - c. pajak penghasilan
 - d. pajak pertambahan nilai
 - e. pajak bumi dan bangunan
7. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber penerimaan lain pemerintah daerah di Indonesia (kabupaten/kota) adalah dari pemerintah pusat. Penerimaan dari pemerintah pusat tersebut antara lain berupa dan disebut:
- a. Dana Alokasi Umum
 - b. Subsidi Daerah Otonom
 - c. Subsidi Pemerintah Pusat
 - d. Bagian dari Penerimaan Ekspor
 - e. Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara
8. APBD tingkat II (Kabupaten / Kota) proses penyusunannya adalah
- a. disusun oleh pemerintah daerah dan DPRD tingkat II dan disetujui oleh DPRD tingkat I
 - b. disusun oleh pemerintah daerah tingkat II dan disahkan oleh DPRD tingkat II setempat

- c. disusun oleh pemerintah daerah tingkat II, lalu mendapat persetujuan Gubernur untuk disahkan oleh DPRD tingkat I
 - d. disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat II dan disetujui oleh Gubernur setempat
 - e. disusun bersama-sama Gubernur lalu disahkan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR
9. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I (Propinsi) proses penyusunannya adalah
- a. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh DPR RI
 - b. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI
 - c. Disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD tingkat I lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI
 - d. Disusun oleh pemerintah daerah tingkat I dan disahkan oleh DPRD tingkat I setempat
 - e. Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD tingkat I dan disetujui oleh presiden
10. Dampak langsung pengenaan pajak atas suatu barang ialah....
- a. kenaikan harga barang yang bersangkutan
 - b. meningkatnya laju inflasi
 - c. berkurangnya produksi atau pasokan (supply) barang tersebut
 - d. berkurangnya penjualan (permintaan terhadap) barang tersebut
 - e. meningkatnya penerimaan atau pendapatan pemerintah
11. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimaksud dengan tabungan pemerintah (government's savings) ialah....
- a. selisih penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin
 - b. selisih penerimaan total dikurangi belanja total dalam
 - c. selisih penerimaan pajak dikurangi pengeluaran subsidi
 - d. selisih penerimaan dalam negeri dikurangi belanja total
 - e. selisih penerimaan total dikurangi belanja rutin

12. Di antara ketentuan atau kebijakan di bawah ini yang merupakan contoh kebijakan fiskal ialah....

- a. kenaikan tarif bagi kendaraan yang melintasi jalan tol
- b. pemberian keringanan pajak (tax holiday) bagi perusahaan baru
- c. kenaikan atau penurunan BI rate (sukubunga SBI satu bulan)
- d. perubahan giro wajib minimum (GWM) bagi bank-bank
- e. keharusan BUMN untuk menyetorkan sebagian labanya ke kas negara

13. Di bawah ini beberapa gambaran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi:

- 1. Sektor pajak bumi dan bangunan pada tahun anggaran 2007 naik dua kali lipat sehingga memberatkan para petani kecil
- 2. Kasus dari sektor penerimaan retribusi parker di semua wilayah hampir sama yaitu sebagian besar menguap yang tidak jelas juntrungannya.
- 3. Penerimaan pajak penghasilan belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mempunyai NPWP
- 4. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% merupakan pajak tidak langsung karena dibebankan kepada para konsumen dalam membayar barang
- 5. Pada saat ini ada lima perusahaan raksasa yang sedang gencar-gencarnya memasang iklan secara besar-besaran, hal ini mengakibatkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

Gambaran di atas yang dapat digolongkan sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat adalah

- a. 1, 2 dan 3
- b. 1, 3 dan 4
- c. 2, 4 dan 5
- d. 3, 4 dan 5
- e. 2, 3 dan 4

14. Berikut ini yang merupakan jenis pajak provinsi adalah...

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Penjualan Barang Mewah
- c. Pajak Bea Masuk

- d. Pajak Hotel
 - e. Pajak Bea Keluar
15. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat atau seefisien mungkin dengan memperhitungkan antara biaya pemungutan pajak yang tidak melebihi penerimaan pajak itu sendiri merupakan prinsip pemungutan pajak....
- a. Prinsip kesamaan
 - b. Prinsip kepastian
 - c. Prinsip ketepatan waktu
 - d. Prinsip ekonomis
 - e. Prinsip efisiensi
16. Ketika pemerintah meningkatkan belanjanya maka akan menyebabkan kenaikan suku bunga di pasar uang sehingga akan mengurangi jumlah investasi. Dalam ilmu ekonomi hal tersebut dikenal sebagai....
- a. Liquidity trap effect
 - b. Multiplier effect
 - c. Catch up effect
 - d. Crowding out effect
 - e. Accelerator effect
17. Untuk membiayai defisit APBN, hal berikut ini yang dapat dilakukan, kecuali
- a. Mencetak uang
 - b. Meningkatkan tax compliance dan tax base
 - c. Menerbitkan obligasi pemerintah
 - d. Utang luar negeri
 - e. Kebijakan tax holiday
18. Di bawah ini merupakan jenis kebijakan fiskal ekspansif, yaitu...
- a. Menaikkan tingkat pajak
 - b. Menempuh APBN surplus
 - c. Mengurangi defisit APBN

- d. Menurunkan pajak
 - e. Tidak ada jawaban yang benar
19. Jika pemerintah menaikkan pajak, berikut ini adalah pernyataan yang benar, kecuali ...
- a. Konsumsi masyarakat akan turun
 - b. Akan mengurangi pendapatan disposabel
 - c. Akan mengurangi pendapatan nasional
 - d. Akan mengurangi defisit APBN
 - e. Akan menambah defisit APBN
20. Belanja negara dibagi menjadi belanja pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah. Yang termasuk belanja pemerintah pusat kategori non kementerian/lembaga adalah ...
- a. Pembayaran bunga utang luar negeri dan dana desa
 - b. Pembayaran bunga utang luar negeri dan dana alokasi khusus
 - c. Pembayaran bunga utang luar negeri dan subsidi energi
 - d. Subsidi energi dan dana alokasi umum
 - e. Pembayaran bunga utang luar negeri dan dana alokasi umum
21. Yang berwenang menyusun APBN setiap tahunnya adalah dan disusun karena total belanja lebih besar dari total pendapatan negara.
- a. Kemenkeu, surplus
 - b. Bank Indonesia, surplus
 - c. OJK, defisit
 - d. Kemenkeu, defisit
 - e. Bank Indonesia, berimbang
22. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat secara umum dinamakan....
- a. Dana Alokasi Umum
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Dana Otonomi
 - d. Penerimaan Negara Bukan Pajak

- e. Subsidi Desentralisasi

23. APBN dan APBD terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut :

1. APBN disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR
2. APBN diawali bulan Maret dan berakhir bulan April
3. APBD disusun oleh DPRD dan disahkan oleh Bupati / Gubernur
4. APBD diawali bulan Januari dan berakhir bulan Desember

Dari uraian di atas, pernyataan yang benar adalah

- a. 1 dan 2
- b. 1 dan 4
- c. 2 dan 4
- d. 3 dan 4
- e. 2 dan 3

24. Pin collecting taxes, we must consider that effectiveness and efficiency, it means that considering to make the tax collect's cost is not more than the tax collect's result. That statement is suitable with the principal of

- a. Equality
- b. Certainly
- c. Suitable
- d. Law Certainly
- e. Economics

25. Salah satu komponen yang termasuk pos penerimaan dalam APBD daerah adalah

- a. PPh Migas
- b. Pajak Kekayaan
- c. PPn-BM
- d. Dana Alokasi Umum (DAU)
- e. Hibah

26. Belanja Negara tercermin dalam daftar sebagai berikut:

1. Dana bagi hasil

2. Pembiayaan bunga utang
3. Subsidi BBM
4. Dana alokasi umum
5. Belanja pegawai
6. Belanja barang
7. Dana alokasi khusus
8. Belanja modal

Berdasarkan daftar di atas, yang termasuk belanja pemerintah pusat adalah ..

- a. 1, 2, 3, 4, dan 5
- b. 1, 2, 5, 6, dan 7
- c. 2, 3, 5, 6, dan 8
- d. 2, 5, 6, 7, dan 8
- e. 3, 4, 5, 7, dan 8

27. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi:

- 1) Fungsi Stabilitas
- 2) Fungsi Distribusi
- 3) Fungsi Asasi
- 4) Fungsi Moneter
- 5) Fungsi Alokasi

Yang termasuk ke dalam fungsi APBN adalah:

- a. 1, 2, dan 3
- b. 1, 2, dan 5
- c. 2, 3, dan 4
- d. 1, 3, dan 4
- e. 2, 3, dan 5

28. Di bawah ini merupakan respons kebijakan fiskal yang tepat untuk diambil pemerintah dalam mengatasi inflasi, kecuali...

- a. Meningkatkan tingkat pajak
- b. Menempuh APBN surplus
- c. Mengurangi defisit APBN

- d. Menurunkan pajak
- e. Tidak ada jawaban yang benar

29. Dalam APBN, keseimbangan primer adalah.....

- a. Pendapatan Total dikurangi Belanja Total
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak dikurangi Belanja Rutin
- c. Selisih Pendapatan Total dengan Belanja Rutin
- d. Selisih Pendapatan Total dengan Belanja Total tanpa Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
- e. Pendapatan Total sama dengan Belanja Total

30. APBN 2018 disusun oleh Ibu Sri Mulyani selaku, mengingat program prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur memerlukan dana yang tidak sedikit.

- a. Berimbang, Menteri Perdagangan
- b. Defisit, Menteri Perdagangan
- c. Surplus, Menteri Keuangan
- d. Defisit, Menteri Keuangan
- e. Surplus, Gubernur Bank Indonesia